



Implikasi Pembangunan Ekonomi dan Politik yang Buruk terhadap Konflik Lokal dan Terorisme

Implications of Adverse Economic and Political Development on Local Conflict and Terrorism

Rohannisa Naja Rachma Savitri

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan

E-mail: Annisa.savitri@gmail.com

Abstract

Economic and political development are expected to be able to bring an optimal distribution of welfare to all levels of society. However, when the policies are not properly organized, this will certainly present economic and political inequality which then becomes the gateway for conflict and violence to arise in the community such as local conflict and terrorism. The purpose of this study is to determine the relation between the poor economic and political development and its implications for the emergence of local conflicts and terrorism. The method used in this research is a qualitative descriptive analysis and library study as a technique in collecting the required data. In addition, this study uses conflict theory and social welfare theory and also uses the concept of economic and political development and the concept of terrorism as a tool to explain the problems of this research. From the research that has been conducted, the researcher then draws the conclusion that the poor implementation of existing policies regarding the economical and political development that occurs has an indication of the occurrence of local conflicts and the emergence of crimes like terrorism. It can be concluded, from observing such events that happened in the past, instability in economic and political development can be a major trigger in the emergence of local conflicts and terrorism.

Keywords: Economic and political development, Local Conflict, Terrorism



1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan cita – cita dari semua bangsa, terutama negara Dunia Ketiga. Mereka mendambakan keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dasar, angka kekayaan rata – rata yang semakin meningkat, pemerataan kesejahteraan secara optimal, kualitas hidup dan lingkungan yang baik, serta ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial. Apabila semua aspek ini terpenuhi, maka suatu negara telah berhasil dalam membangun ekonomi, dan keberhasilan tersebut akan bermuara pada peningkatan rasa harga diri bangsa serta masyarakat nya (Pearce, Barbier and Markandya 1990, 1-3). Namun, pembangunan ekonomi tidak berada di ruang hampa. Pembangunan ekonomi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek – aspek politis dan kelembagaan. Secara simultan, pembangunan ekonomi dan kebijakan pemerintah menjamin stabilitas. Namun, apabila aspek – aspek tersebut tidak tertata dengan baik, yang kemudian menciptakan ketimpangan ekonomi dan politik, terdapat tendensi bagi munculnya konflik serta kekerasan. Hubungan realsional antara pembangunan ekonomi dan politik dalam negara tersebut yang kemudian dapat mendeterminasi perkembangan suatu masyarakat (Solimano 2005, 1). Di sisi lain, konflik dan kekerasan memiliki bentuk yang beragam, dimana konflik terbesar adalah konflik lokal dan terorisme.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pembangunan Ekonomi dan Politik

Pemahaman bahwa pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan politik dalam suatu masyarakat sejatinya merupakan diskursus yang baru. Sebelumnya, pembangunan ekonomi diartikan secara lebih sederhana. Pengukuran pembangunan ekonomi hanya berkiblat pada angka pendapatan per kapita



nasional. Pandangan tradisional ini berfokus pada pembangunan melalui industrialisasi. Semakin cepat bertumbuhnya kawasan industri dan berkurangnya daerah rural dan agrikultur, semakin cepat pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, definisi ini kemudian berubah satu dekade setelah Perang Dunia II, di mana banyak negara berkembang yang berhasil mencapai target pertumbuhan ekonominya tanpa perubahan signifikan pada aspek kehidupan masyarakatnya. Hal ini kemudian membawa para pemikir kepada kesimpulan bahwa definisi pembangunan ekonomi yang digunakan sangatlah sempit (Todaro and Smith, *Economic Development* 2015, 12).

Amartya Sen pun mengemukakan sebuah pandangan baru terhadap pembangunan ekonomi, di mana kemiskinan tidak bisa diukur secara jelas menggunakan pendapatan ataupun jenis satuan ukur konvensional lainnya. Kemiskinan diukur dari hal – hal penting yang secara fundamental dimiliki oleh tiap – tiap individu. Artinya, indikator pembangunan ekonomi bukan hanya ketersediaan suatu barang ekonomi, tetapi juga nilai fungsi barang ekonomi tersebut bagi tiap – tiap individu, sehingga dapat ditarik pengertian pembangunan ekonomi secara luas. Pembangunan ekonomi diyakini, baik secara langsung maupun tidak, akan mengarahkan masyarakat kepada kebebasan masyarakat dalam memilih (*freedom of servitude*) sebagai bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia (Todaro and Smith, *Economic Development* 2015, 18-19). Seperti yang telah disebutkan di awal, pembangunan ekonomi memiliki dampak yang sangat besar bagi suatu negara dan masyarakatnya. Tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan budaya. Konteks ini pun berlaku dua arah; kondisi social budaya di suatu daerah juga akan memengaruhi kegiatan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, jurnal ini lebih terfokus pada pengaruh pembangunan ekonomi dan politik yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya konflik baik konflik lokal maupun terorisme yang ada di masyarakat.



Politik dalam konteks ini dapat dilihat sebagai suatu upaya dalam mengalokasi kekuasaan. Seperti halnya dengan status sosial yang didapat melalui tiga cara – *assigned*, *ascribed*, *achieved* – alokasi kekuasaan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pandangan konvensional akan alokasi kekuasaan adalah kekuasaan pemerintah yang dialokasikan melalui lembaga – lembaga publik. Selain itu, alokasi kekuasaan juga dapat ditemukan di tengah masyarakat contohnya adalah kekuasaan politik yang dialokasikan kepada individu – individu yang berasal dari sub – kelompok masyarakat tertentu, sesuai dengan mekanisme yang disepakati bersama. Cara terakhir pengalokasian kekuasaan adalah melalui koersi, dengan bentuk antara lain paksaan, ancaman, maupun kekerasan (Frazer 1999, 222).

2.1 Teori Konflik

Untuk membangun sebuah pemahaman mengenai konflik yang terjadi pada masyarakat, terdapat beberapa konsep dan teori yang diperkenalkan dan digunakan oleh beberapa ahli. Teori konflik merupakan teori yang bertolak belakang dengan teori structural fungsionalisme. Gagasan yang dikemukakan oleh Karl Marx melihat masyarakat sebagai sistem kompleks yang saling berkompetisi, bukan sebuah equilibrium. Masyarakat terdiri dari individu – individu yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Hal inilah yang memunculkan ketimpangan dalam masyarakat; mempertahankan kategori – kategori tersebut dengan segala kekuasaannya di masyarakat. Teori konflik juga melihat kedudukan tiap kelompok yang berbeda; ada yang lebih dominan dan ada juga yang terpaksa menjadi submisif (Dadgar 2020, 43-44).

Konflik berasal dari kata *con* (bersama) dan *fligere* (friksi) (Setiadi and Kolip 2011, 345). Secara umum konflik sosial berarti friksi yang terjadi antar individu. Friksi ini dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari perbedaan kelas sosial hingga perang



antarnegara. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai upaya untuk mencapai suatu nilai, pengakuan, dan kekuasaan, yang mana melibatkan keharusan untuk mengeliminasi rival yang ada untuk mencapai tujuan tersebut (Zeitlin 1998, 156). Berbeda dengan pengertian konflik, yang mana menekankan pada adanya argumentasi dan friksi, dalam konteks ini melibatkan tidak hanya individu, tetapi juga kelompok – kelompok masyarakat dan kekerasan (Narwoko and Suyanto 2005, 68). Konflik sosial secara garis besar bersifat horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang berkembang di antara anggota kelompok, seperti terdapat kemungkinan munculnya suatu konflik antar etnis, agama, ras dan golongan. Akan tetapi, tidak menutup juga adanya konflik vertical yang merupakan konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga negara atau pemerintahan. Menurut Soerjono Soekanto, konflik sosial dapat berbentuk konflik rasial, konflik politik, konflik internasional, dan konflik pribadi (Soekanto 1992, 86).

2.2 Teori Kesejahteraan Sosial

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan tentu saja saling berkaitan. Menurut Suparlan, kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial, dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja, melainkan merupakan suatu keadaan dan kegiatan. (Suud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial 2006, 5). Adapun pengertian – pengertian para ahli lain mengenai kesejahteraan sosial yaitu Friedlander mendefinisikan kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan – pelayanan dan lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan – hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan



kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan keluarga dan masyarakatnya (Suud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial 2006, 8). Midgley mengemukakan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur antara lain, pertama, setinggi apa masalah – masalah sosial dikendalikan, kedua, seluas apa kebutuhan – kebutuhan dipenuhi dan terakhir, setinggi apa kesempatan – kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu – individu, keluarga – keluarga, komunitas – komunitas dan bahkan seluruh masyarakat (Suud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial 2006, 5).

Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran – ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*), dan pembangunan manusia (*human development*) (Sen 2008, 8). Fungsi dari kesejahteraan sosial ini adalah untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan – tekanan yang diakibatkan oleh perubahan – perubahan sosio – ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi – konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi – fungsi kesejahteraan sosial yakni: (Fahrudin 2012, 12)

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah – masalah sosial baru.

b. Fungsi penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi – kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi Kembali secara wajar dalam masyarakat.

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)



Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*Support*)

Mencakup kegiatan – kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

2.3 Terorisme

Secara etimologi, kata “terorisme” berasal dari kata *terror* dalam Bahasa Inggris, atau *terrere* dalam Bahasa Latin, yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan (Damayanti, et al. 2013). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata terror sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan (Budaya n.d.). Ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa terror merupakan suatu bentuk pemikiran, sedangkan terorisme adalah aksi atau tindakan yang sudah terorganisir. Namun, mayoritas memiliki pendapat bahwa terror bisa terjadi tanpa adanya terorisme, sementara terror merupakan unsur asli yang melekat pada terorisme (Damayanti, et al. 2013, 5).

Isitilah terorisme memang sudah ada dan digunakan sejak ribuan tahun silam. Terorisme terus berkembang dan mengalami perubahan baik dari segi motif maupun pola aksi. Aksi tersebut juga dapat bermotifkan politik, ideologi, ekonomi, atau bahkan gabungan dari motif – motif tersebut. Tindakan terorisme ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi sosial politik, ideologi, seperti ideologi radikalisme yang merupakan embrio sehingga menumbuhkan aksi terorisme, dan faktor ekonomi. Pada era sekarang, telah banyak muncul kelompok – kelompok terorisme baik secara nasional maupun internasional seperti, Jamaah Islamiya (JI), Al-Qaeda, Abu Sayyaf Group, dsb. (Damayanti, et al. 2013, 42-51)



Dengan adanya kelompok – kelompok terorisme serta berbagai aksi yang mereka lakukan, tentu saja menimbulkan dampak yang cukup merugikan bagi pihak – pihak yang merasakan. Banyak korban yang timbul dari aksi terorisme, terutama masyarakat sebagai korban langsung yang merasakan. Secara luas, aksi terorisme berdampak pada banyak hal terkait kehidupan bangsa dan negara. Berbagai kerugian sebagai dampak dari terorisme dapat dilihat di berbagai bidang seperti pertahanan dan keamanan suatu negara, ideologi, stabilitas politik, perkembangan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, pendidikan, bahkan dapat juga menimbulkan dampak pada hubungan antar agama. Aksi terorisme yang dilakukan menimbulkan rasa bangga terhadap keberhasilan mereka untuk menebarkan rasa takut serta hal lain yang membuat mereka berfikir bahwa mereka berhasil untuk melakukan aksi terror (Irwansyah 2018, 999).

3 Metode Penelitian

Dalam jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan / menjelaskan permasalahan secara luas dengan cara pengumpulan data yang sebanyak – banyaknya dan dikupas sedalam – dalamnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah Teknik pengmpulan data yang berbentuk studi kepustakaan / studi literatur dengan metode deskriptif dari sumber – sumber penelitian sebelumnya maupun data sekunder lainnya.

Sumber kepustakaan tersebut berasal dari kumpulan – kumpulan jurnal, buku, dan kajian – kajian yang diteliti dan ditulis oleh individu, instansi, serta dokumen – dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penerapan pembangunan ekonomi dan poliitik terhadap konflik lokal dan terorisme.



4 Hasil dan Diskusi

4.1 Implikasi Pembangunan Ekonomi dan Politik yang Buruk terhadap Konflik Lokal

Sebagaimana kita ketahui, pembangunan ekonomi dan politik memiliki dampak yang sangat besar bagi suatu negara dan masyarakat di dalamnya. Apabila dilihat dari sisi pembangunan ekonomi maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu sumber daya demi tercapainya sebuah kesejahteraan pada manusia. Kegagalan dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dapat menjadi pemicu lahirnya permasalahan baru, yaitu konflik. Banyak yang mengatakan bahwa ekonomi tidaklah relevan dengan terjadinya suatu konflik, maka disitulah terjadinya kesalahan pada pandangan tersebut. Untuk memahami bagaimana hubungan antara pembangunan ekonomi dengan konflik dapat digunakan model pendekatan konflik sebagai posterior.

Konflik sebagai posterior ini melihat pembangunan ekonomi sebagai variabel independen terjadinya suatu konflik, di mana konflik muncul ketika adanya kegagalan pembangunan ekonomi (Perwita 2015). Kondisi ekonomi dan timbulnya suatu konflik sangatlah berkaitan, di mana pada kondisi ekonomi dapat terjadi ketimpangan dan kelangkaan sumber daya. Ketimpangan ini terjadi ketika pembangunan ekonomi hanya berfokus pada usaha menyejahterakan Sebagian dari masyarakat saja, sementara anggota masyarakat yang lainnya diabaikan. Situasi ketimpangan ini pun tidak bisa dihindari, akan tetapi ketika kondisi ini meningkat, maka konflik sangat mungkin terjadi seperti contohnya, adanya ketimpangan antara masyarakat yang kaya dan miskin tidak hanya terjadi karena aktivitas ekonomi tetapi juga karena kebijakan publik terkait ekonomi.

Kita dapat mengambil contoh yaitu, Konflik Sampit, konflik lokal yang terjadi di Kalimantan Tengah pada Februari tahun 2001. Terjadi pembunuhan sekitar 500 orang beretnis Madura oleh komunitas Dayak serta sekitar 319 lebih rumah dibakar dan sekitar



197 lainnya rusak (Rinaldo 2019). Konflik ini berujung pada tak satupun penduduk etnis Madura yang tinggal di Kota Sampit. Konflik ini muncul akibat proses peminggiran secara ekonomi dan politik kaum Dayak oleh Pemerintahan Orde Baru sehingga memunculkan ketimpangan sosial ekonomi antara masyarakat asli (Dayak) dengan masyarakat pendatang (Madura). Contoh lain adalah seperti yang terjadi di Maluku dan Poso yang sebagian disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi antara kelompok – kelompok masyarakat yang berbeda (Damayanti, et al. 2013, 34)

Tidak hanya pembangunan ekonomi yang menjadi pemicu dalam munculnya konflik lokal, namun dapat juga dilihat dari kacamata politik. Namun, pertama – tama, mari kita lihat dari teori konflik, dapat ditemukan bahwa konflik – konflik tersebut bermula dari perbedaan mendasar dari Masyarakat Hukum adat dengan masyarakat pada umumnya. Konflik ethno – politik, menurut Gurr, adalah konflik antar kelompok etnis terhadap aktor politis lainnya. Friksi politik dalam konflik etnis tidak hanya dipicu oleh keinginan etnis untuk mencari kesetaraan hak dan kekuatan politik, tetapi juga untuk mempertahankan entitasnya. Konflik memiliki dua objektif yaitu untuk mendapatkan kemerdekaan atau mendapatkan akses dalam sistem politik yang ada di masyarakat, yang memiliki tendensi untuk mengoperasi kelompok – kelompok etnis tersebut, memicu digunakannya upaya – upaya koersif dan berbentuk kekerasan yang dapat tereskelasi menjadi konflik skala besar (Lobell and Mauceri 2004, 136).

Dalam situasi di mana terdapat stabilitas kekuasaan antara kelompok etnis dan kelompok masyarakat lainnya, konflik dapat dihindari. Namun, apabila terdapat redistribusi kekuasaan yang substansial – akibat migrasi, tingkat natalitas yang berbeda, atau modernisasi – yang kemudian mengubah kedudukan ekonomi, politik, dan sosial, maka akan muncul tuntutan untuk merelokasi kekuasaan tersebut kembali. Dalam kondisi ini lah ketimpangan politik antara mayoritas dan minoritas menjadi sangat terlihat. Konflik juga dapat diperparah dengan tidak terepresentasikannya dengan baik



kelompok etnis dalam lembaga pemerintahan (Lobell and Mauceri 2004, 5-6). Cara yang berbeda dalam mempersepsikan kehidupan dengan segala aspeknya memperlebar potensi konflik kepentingan antara kelompok masyarakat pada umumnya dan kelompok etnis/masyarakat hukum adat. Pada akhirnya, konflik kepentingan ini sangat berpengaruh pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pendistribusian kekuasaan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah memiliki potensi untuk menyebabkan *abuse of power*. Kekuatan dan kekuasaan, sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan atau tanpa resistensi. Otoritas yang dimiliki pemerintah sendiri merupakan manifestasi kekuasaan yang berupa hak, legitimasi, dan justifikasi. Pada Akhirnya, kepentingan yang dibawa oleh tiap – tiap perseorangan dijustifikasi dengan peraturan yang dikeluarkan (Cragun, Cragun and Konieczny 2008).

Dengan sistem politik yang mana kebijakannya ditentukan oleh mayoritas, maka kelompok – kelompok dengan kekuatan politik yang lebih kecil menjadi korban dari kekerasan etnis. Kekuasaan kelompok mayoritas tersebut ditentukan tidak hanya dari entitas kelompok sosialnya, tetapi juga dari kekayaannya. Dengan kata lain, menurut Amy Chua, ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan alokasi politik, yang akan mengarah pada konflik. Argumentasi ini menjadi landasan bagi pemahaman bahwa demokrasi harus diperkenalkan secara perlahan dan hati – hati di negara – negara berkembang dengan pendapatan menengah ke bawah untuk menghindari besarnya celah politik, baik secara kelembagaan maupun di tangan masyarakat itu sendiri (Soeters 2005, 35-36)

4.2 Implikasi Pembangunan Ekonomi dan Politik yang Buruk terhadap Terorisme

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan juga disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dilakukan dalam



berbagai bentuk juga. Parameter terorisme tidak hanya menjadikan pelaku atau pendukung pelaku sebagai parameter tetapi ada juga yang menjadikan cara dan motif pelakunya sebagai parameter. Seiring berkembangnya zaman, terorisme juga mengalami perubahan dari segi motif maupun pola aksi. Namun, dibalik semua bentuk – bentuk terorisme juga pasti terdapat latar belakang dari aksi terorisme tersebut. Latar belakang tersebut dapat dilihat dari implikasi pembangunan ekonomi dan politik yang buruk sehingga muncul Gerakan atau aksi terorisme. Motif tersebut bisa saja berlatar belakang politik, ideologi, ekonomi, atau bahkan gabungan dari ketiga motif itu.

Jika kita berbicara tentang pembangunan ekonomi, tentu saja dalam suatu pemerintahan pasti terdapat kegagalan pemerintah untuk menciptakan sebuah kesejahteraan untuk rakyatnya yang kemudian dapat menjadi pemicu terjadinya aksi terror (Damayanti, et al. 2013, 34). Dari kegagalan ini timbullah kekecewaan yang kemudian menjadi lahan bagi tumbuhnya konflik, aksi separatisme, dan juga terorisme. Gerakan separtisme juga dapat terjadi karena adanya ketidakpuasan golongan masyarakat tertentu terhadap kebijakan – kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai kurang memperhatikan kebutuhan warga. Dari situ lah kelompok teroris juga dapat memanfaatkan keadaan di mana masyarakat tidak puas terhadap kinerja pemerintah sehingga hal tersebut dijadikan alat untuk memercik kebencian terhadap pemerintah. Tidak heran jika kemudian gerakan – gerakan terorisme ini mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menggulingkan pemerintah yang dianggap korup.

Selain itu, angka pengangguran yang tinggi juga dapat menjadi pemicu dan dapat menjadi peluang bagi kelompok – kelompok teroris dan radikal untuk merekrut masyarakat menjadi anggota (Damayanti, et al. 2013, 35). Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemahaman agama yang kemudian diselipkan dengan ayat – ayat kitab suci yang diselewengkan menjadi faktor yang mudah mengubah para pengangguran menjadi pelaku terror. Pemerintah perlu untuk memperhatikan kondisi –



kondisi yang melibatkan kondisi perekonomian masyarakat. Kesejahteraan ekonomi harus didapatkan oleh seluruh warga negaranya secara merata, akan tetapi hal tersebut juga tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya terorisme. Dengan demikian, gerakan – gerakan kelompok terorisme tidak mendapatkan peluang untuk dukungan simpati dari masyarakat.

Pembangunan dan kondisi politik suatu negara juga sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya gerakan – gerakan atau kelompok terorisme. Terlepas dari pembangunan ekonomi, peran politik menjadi sangat berpengaruh terhadap paham kebangsaan dan terorisme. Dengan kata lain, apabila suatu kebijakan politik tidak merata dan tidak dikelola dengan baik, maka akan ada potensi bagi tumbuh kembangnya terorisme dalam kelompok masyarakat tersebut (Keefer and Loayza 2008, 1-2). Terorisme dalam arti “penciptaan rasa takut dengan melakukan pembunuhan, penculikan, dan sebagainya” (Irwansyah 2018, 88), muncul ketika ada krisis, terutama krisis negara yang terpecah (seperti kasus yang terjadi di Lebanon), merajalelanya korupsi (kasus di Italia), atau sangat refresif (kasus Jerman Barat), serta sistem politik tersumbat (kasus Italia tahun 1970 sebagai akibat “kompromi historis” antara partai Demokrat Kristen dan Komunis) (B.S. 2008, 874-875).

Faktor politik berupa masuknya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi politik terkadang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan tindakan yang dapat melanggar suatu aturan atau perundangan – perundangan suatu negara (Sumardewi 2012, 5). Dalam menjalankan aksinya, terorisme biasanya merupakan sebuah bentuk kekerasan, disertai dengan aksi terror terhadap penduduk sipil dan pemerintahan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengubah ideologi Negara yang bersangkutan (Sumardewi 2012, 5). Tindakan kekerasan dan terror tersebut yang kemudian membentuk kecemasan dan ketakutan masyarakat serta menimbulkan opini publik terkait dengan keamanan negara sekaligus menimbulkan ketidakpercayaan terhadap



pemerintahan karena pemerintahan dianggap tidak dapat melindungi rakyatnya dari aksi terorisme (Sumardewi 2012, 6).

Jika mengambil contoh dari apa yang terjadi di Indonesia, dapat dilihat pada masa Orde Baru, di mana terdapat kekecewaan terhadap pemerintahan Soeharto karena tidak menjalankan Syariat Islam, melainkan menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia yang dianggap gagal memberikan rasa aman serta kesejahteraan bagi rakyatnya, terutama bagi umat Islam (Damayanti, et al. 2013, 23). Pemerintahan pada masa Orde Baru dinilai terlalu otoriter, korup, dan represif terhadap kelompok – kelompok Islam. Seiring berjalannya waktu, pada Era Reformasi kondisi politik Indonesia mengalami perubahan di mana timbul kebebasan dalam semua bidang. Namun, sayangnya di masa itu terdapat ketidakstabilan keadaan seperti korupsi, kesenjangan perekonomian masyarakat dan perebutan kekuasaan antar kepentingan politik. (Damayanti, et al. 2013, 24). Sebagai hasil dari ketidakstabilan politik dalam Indonesia, maka hal tersebut memberikan peluang terhadap gerakan – gerakan radikal dan kelompok teroris untuk menyebarkan ideologi mereka, melaksanakan perekrutan anggota baru, serta melakukan aksi – aksi dalam rangka menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

5 Kesimpulan

Didasarkan pada sebuah negara yang memiliki keinginan untuk berhasil dalam memenuhi kebutuhan dasar serta pemerataan kesejahteraan secara optimal, maka pembangunan ekonomi dan politik perlu dilakukan sebaik – baiknya untuk menjamin stabilitas. Namun, seringkali aspek – aspek tersebut tidak tertata dengan baik, yang kemudian menciptakan ketimpangan ekonomi dan politik, sehingga terdapat tendensi bagi kemunculan konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan tersebut memiliki bentuk yang beragam, yang di antaranya adalah konflik lokal dan terorisme.



Konflik lokal yang muncul adalah sebagai akibat dari kegagalan pembangunan ekonomi, seperti pemerataan kesejahteraan sehingga terjadinya suatu ketimpangan sosial. Ketimpangan ini terjadi ketika pembangunan ekonomi hanya berfokus pada menyejahterakan sebagian dari masyarakat saja, sementara anggota masyarakat yang lainnya diabaikan. Selanjutnya jika dilihat dari segi politik, adanya redistribusi kekuasaan yang substansial yang kemudian mengubah kedudukan ekonomi, politik, dan sosial, maka akan muncul tuntutan untuk merelokasi kekuasaan tersebut kembali, sehingga ketimpangan politik antara mayoritas dan minoritas menjadi sangat terlihat.

Instabilitas pembangunan ekonomi dan politik juga dapat memicu timbulnya gerakan – gerakan atau aksi terorisme. Kegagalan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi menjadi faktor utama karena munculnya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan sehingga muncul lah konflik dan aksi terror. Sebagai akibat dari kegagalan pemerataan ekonomi, banyak timbul pengangguran dalam masyarakat sehingga hal tersebut dapat menjadi sasaran empuk kelompok – kelompok terorisme untuk menanamkan idenya yang menjanjikan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya kelompok terorisme itu akan mendapatkan simpati dari masyarakat. Peran politik menjadi sangat berpengaruh juga terhadap paham kebangsaan dan terorisme. Apabila suatu kebijakan politik tidak merata dan tidak dikelola dengan baik, maka akan ada potensi bagi tumbuh kembangnya terorisme dalam kelompok masyarakat tersebut. Faktor politik berupa masuknya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi politik membuat masyarakat melakukan tindakan – tindakan kekerasan sehingga membentuk kecemasan dalam masyarakat sekaligus menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam hal melindungi waga negaranya.



Daftar Pustaka

- B.S., Tri Wibowo. 2008. *Kamus Lengkap Pemikiran Sosial Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budaya, Kementerian Pendidikan dan. n.d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Accessed Oktober Minggu, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teror>.
- Cragun, Ryan T., Deborah Cragun, and Piotr Konieczny. 2008. *Introduction to sociology*. Seven Treasures Publication.
- Dadgar, Yadollah. 2020. "Economics and Politics: Editorial note." *International Journal of Economics and Politics Vol 1 No. 1 1*.
- Damayanti, angel, Hemay, Idris, Muchtadlirin, Sholehudin A, Pranawati, and Rita. 2013. *Perkembangan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Frazer, Elizabeth. 1999. *The Problems of Communitarian Politics: Unity and Conflict*. Oxford: Oxford University Press.
- Irwansyah. 2018. "Politik Global dan Isu Teroris." *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Vol.1 No.1 88*.
- Keefer, Phili, and Norman Loayza. 2008. *Overview: Terrorism, Economic Development, and Political Openness*. Cambridge University Press.
- Lobell, Steven E., and Phillip Mauceri. 2004. *Ethnic Conflict and International Politics: Explaining Diffusion and Escalation*. New York: Palgrave Macmillan.
- Lobell, Steven, and Philip Mauceri. 2004. *Ethnic Conflict and International Politics: Explaining Diffusion and Escalation*. New York: Palgrave Macmillan.
- Narwoko, J. Dwi, and Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.



- Pearce, David, Edward Barbier, and Anil Markandya. 1990. *Sustainable Development: Economics and Environment in Third World*. London: Edward Elgar Publishing Limited.
- Perwita, Anak Agung Banyu. 2015. *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sen, Amartya. 2008. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiadi, Elly M., and Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahanannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soeters, Joseph L. 2005. *Ethnic Conflict and Terrorism: The Origins and Dynamics of Civil War*. Abingdon: Routledge.
- Solimano, Andres. 2005. *Political Crisis, Social Conflict, and Economic Development: The Political Economy of the Andean Region*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Sumardewi, Luh Ashari. 2012. "Upaya Indonesia dalam Memberantas Terorisme di Era Susilo Bambang Yudhoyono."
- Suud, Mohammad. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- . 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- . 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 2015. *Economic Development*. New Jersey: Pearson.
- . 2015. *Economic Development*. New Jersey: Pearson.
- Zeitlin, Irving M. 1998. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.